

CSIS ELECTION SERIES No. 3



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa



NOORY OKTHARIZA

The CSIS Election Series is a means by which members of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) research community can quickly disseminate their research findings and encourage exchanges of ideas. The author(s) welcome comments on the present form of this paper. The views expressed here are those of the author(s) and should not be attributed to CSIS Jakarta.

© 2019 Centre for Strategic and International Studies, Jakarta

Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa

Noory Okthariza

Ringkasan Eksekutif

1. Politik uang dan patronase adalah dua hal yang cukup akrab kita dengar dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Ini karena adanya kepercayaan bahwa dua hal ini dapat mempengaruhi preferensi pemilih sehingga pada gilirannya akan menguntungkan calon yang menggunakan strategi ini secara elektoral. Tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh politik uang dan patronase terhadap dukungan suara petahana di Pilkada 2018. Sampel yang digunakan terbatas pada Pilkada yang diselenggarakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
2. Hasil analisis menunjukkan pengaruh yang *mixed*. Politik uang hanya sedikit saja berpengaruh positif terhadap dukungan suara petahana. Tetapi dalam kasus-kasus lain, ada juga model strategi elektoral yang mirip dengan politik uang yang malah menurunkan suara calon petahana. Ini menunjukkan hubungan antara politik uang dengan suara petahana bersifat ambigu, dan tulisan ini tidak menemukan hubungan yang terlalu jelas dan sistematis antar keduanya.
3. Variabel lain seperti kepuasan terhadap kinerja Pemprov, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - JK, dan kepuasan terhadap kondisi ekonomi keluarga juga turut diulas dan dihubungkan dengan dukungan suara calon petahana. Hasilnya juga menunjukkan hubungan yang tidak konsisten sehingga sulit untuk mengatakan secara meyakinkan sejauh mana ketiga hal ini akan menguntungkan petahana secara elektoral.
4. Mayoritas responden berkata akan menolak politik uang dan tidak akan memilih calon yang menggunakan politik uang di Pilkada. Responden juga mengatakan bahwa pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan masjid yang dilaksanakan menjelang Pemilu adalah wajar. Tingkat dukungan kandidat petahana di kelompok masyarakat yang mengatakan "wajar" ini lebih tinggi nyaris dua kali lipat.

Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa

Noory Okthariza

Pendahuluan

Politik uang dan patronase marak terjadi dalam politik Indonesia kontemporer. Keduanya digunakan dengan tujuan meraup sebanyak mungkin suara pemilih dalam Pemilu. Tetapi seberapa efektif kedua hal ini mempengaruhi suara pemilih? Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut, dengan fokus kajian pada kandidat petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2018.

Beberapa asumsi perlu diterima terlebih dahulu. Pertama, petahana – dan ini juga berlaku untuk kandidat non-petahana tentu saja – dalam konteks politik Indonesia *memang* memiliki kecenderungan untuk menggunakan politik uang dan patronase sebagai bagian dari strategi memenangkan suara pemilih. Studi-studi soal ini sudah cukup banyak, salah satu yang paling detail adalah kompilasi tulisan yang diedit Aspinall dan Sukmajati (2016) tentang penggunaan politik uang dalam Pemilu 2014 di berbagai daerah. Mereka banyak mengulas soal modus operandi politik uang dan bagaimana jejaring informal aktor dan broker-broker politik di daerah menciptakan hubungan patron-klien yang kental. Asumsi kedua: Petahana memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh lawannya, misalnya akses terhadap diskresi kebijakan. Beberapa studi menjelaskan peran kebijakan yang menguntungkan kandidat presiden petahana dan partai pemerintah, misalnya, kebijakan *conditional cash transfer Bolsa Familia* di Brazil (Zucco Jr, 2013) dan bantuan-bantuan sosial yang secara umum menguntungkan pemerintahan di Amerika Latin yang ingin kembali berkuasa (Layton & Smith, 2015). Selain itu calon petahana juga diuntungkan karena bisa menjalankan kebijakan yang bersifat non-programatik dan *targeted* ke kelompok-kelompok tertentu saja yang dianggap menguntungkan petahana secara elektoral. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang menyasar kelompok-kelompok tertentu itu cenderung akan lebih sering dilakukan menjelang perhelatan Pemilu (lihat Alvarez & Saving, 1997). Alasannya tentu saja karena calon petahana mengharapkan efek elektoral dari apa yang mereka buat. Dan asumsi terakhir, *voters* memiliki kecenderungan untuk melupakan atau setidaknya mengabaikan hal-hal yang terjadi sebelum tahun Pemilu (Healy & Malhotra, 2009). Ini karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun politik biasanya mendapat cakupan pemberitaan yang besar sehingga lebih dapat menyedot atensi pemilih.

Artikel ini hanya akan mengulas pengaruh politik uang dan patronase di tiga provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) berdasarkan survei Pilkada 2018 yang dilaksanakan CSIS tahun lalu. Tiga provinsi ini menjadi bagian dari total 17 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak. Selain tiga provinsi ini, CSIS juga melaksanakan survei serupa di dua provinsi lain, yakni Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Pemilihan provinsi berdasarkan pada ukuran signifikansi jumlah penduduk yang mana dari total lima provinsi ini mencakup kira-kira 140 juta jiwa atau sekitar 50 persen penduduk Indonesia.

Penjelasan Konsep dan Data

Dalam artikel ini, petahana didefinisikan sebagai kandidat yang menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur pada pemerintahan sebelumnya dan mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018 di provinsi yang sama. Dari tiga provinsi yang dijadikan sampel, masing-masing provinsi memiliki satu kandidat petahana: Deddy Mizwar adalah Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 – 2018 yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat; Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang mencalonkan diri kembali; dan Saifullah Yusuf adalah Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2018 yang mencalonkan diri sebagai Gubernur di Jawa Timur.

Sementara politik uang sebetulnya agak sulit untuk didefinisikan karena pada praktiknya ia mengandung elemen-elemen sosial-kultural di mana politik uang dijalankan. Politik uang tidak terbatas pada pemberian *cash* atau barang secara langsung, seperti pemberian uang yang dikenal dengan “serangan fajar” di hari-H pencoblosan di Pileg 2014. Di *edited volume* Aspinall dan Sukmajati (2016) dijelaskan bahwa modus politik uang dalam kampanye bisa juga dilakukan lewat pemberian hadiah (seperti kalender, gelas, gantungan kunci – yang berlogo kandidat tertentu), pengobatan gratis, janji-janji proyek dan bantuan bagi tim sukses jika kandidat terpilih, bantuan-bantuan dalam bentuk uang dan barang yang diberikan kandidat ketika melakukan pertemuan tatap muka di masjid, balai desa, atau rumah penduduk, hingga acara-acara yang sifatnya *social gathering* seperti kejuaraan olahraga, musik dangdut, dan lomba memasak. Semua hal ini pada gilirannya menciptakan sebuah model hubungan resiprokal yang hierarkis antara kandidat, tim pemenangannya (atau yang kerap disebut “tim sukses”), dan pemilih. Tingkat kedalaman hubungan ini memang berbeda-beda. Jika ia terbatas pada keuntungan materi yang sifatnya berkala dari sisi pemilih dengan imbalan dukungan suara kepada kandidat dalam Pemilu, hubungan ini disebut patronase. Tetapi jika hubungan simbiosis ini berlanjut menjadi lebih dalam dan terjadi secara berulang-ulang dengan memanfaatkan jejaring aktor yang lebih luas yang bisa dimanfaatkan baik secara politik dan ekonomi, maka ia disebut klientalisme.

Dari penjelasan di atas, petahana dan calon non-petahana di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan menjadi variabel dependen dari tulisan ini. Redaksi pertanyaan survei terkait ini adalah “Bila pilkada (di Provinsi “X”) dilaksanakan hari ini, manakah di antara pasangan di bawah ini yang akan Bapak/Ibu pilih sebagai gubernur dan wakil gubernur mendatang?” Responden kemudian diberikan kartu bantu yang menyerupai surat suara asli untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban responden diurut berdasarkan nomor urut resmi kandidat yang sudah ditetapkan oleh KPUD masing-masing provinsi. Nomor urut ini kemudian di-coding ulang dengan *dummy* variabel “1” untuk kandidat petahana dan “0” untuk kandidat non-petahana. Kami kemudian men-drop mereka yang menjawab “abstain” atau “tidak tahu” dalam analisis. Total responden yang dianalisis adalah 2,425 yang tersebar secara proporsional di tiga provinsi.

Tabel 1:
Calon Kepala Daerah di Pilkada 2018
(Calon Petahana yang di-*bold* hitam)

Nomor Urut	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
1	M. Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum	Ganjar Pranowo - Taj Yasin	Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto
2	TB. Hasanuddin - Anton Charliyan	Sudirman Said - Ida Fauziyah	Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno
3	Sudrajat - Akhmad Syaikhu		
4	Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi		

Pertanyaan-pertanyaan terkait patronase dan politik uang menjadi variabel independen dalam artikel ini. Redaksi pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. *Bila Bapak/Ibu ditawari barang/uang oleh tim sukses atau pasangan calon gubernur/wakil gubernur tertentu, bagaimanakah sikap Bapak/Ibu? 1. Menerima 2. Menolak*
2. *Bila Bapak/Ibu diberikan barang/uang, apakah Bapak/Ibu akan mempertimbangkan calon yang memberikan barang/uang tersebut atau memilih calon lain yang yang tidak memberikan barang/uang? 1. Memilih calon yang memberikan barang/uang tersebut. 2. Memilih calon lain yang tidak memberikan barang atau uang.*
3. *Menurut Bapak/Ibu, bila ada salah seorang calon gubernur/wakil gubernur membangun sarana umum seperti masjid, jalan aspal, pasar, MCK di daerah Bapak/Ibu, apakah itu hal yang wajar atau tidak? 1. Wajar 2. Tidak wajar*

Selain itu kami juga menguji pertanyaan-pertanyaan yang kami yakini berpengaruh terhadap dukungan petahana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi; pengaruh persepsi kondisi ekonomi keluarga responden setahun terakhir; dan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi - JK.

Hasil

Reaksi responden di ketiga provinsi terbelah terkait dengan apakah akan menerima atau menolak pemberian materi dari calon tertentu. Mereka yang mengatakan “menolak” jumlahnya masih lebih banyak, 52 persen, sementara yang menyatakan “menerima” sekitar 46 persen. Angka ini agak sulit untuk ditakar reliabilitasnya karena pertanyaan sensitif seperti ini cenderung membuat responden memberikan jawaban yang *socially-desirable*.¹ Ini mengingat tak ada responden yang ingin terstigma

¹ Problem socially-desirable responses dalam survei banyak terjadi dalam dunia kesehatan, khususnya jika pertanyaan berkaitan dengan kondisi mental/kesehatan responden; banyak juga terjadi dalam penelitian yang berkaitan dengan konflik dan kekerasan, lebih jauh bisa dilihat Braun, H. I., Jackson, D. N., & Wiley, D. E. (2001). *Socially desirable responding: The evolution of a construct* dalam *The role of constructs in psychological and educational measurement* (pp. 61-84), Routledge atau Ross, C. E., & Mirowsky, J. (1984).

“bisa dibeli” oleh keberadaan politik uang. Oleh sebab itu perlu ditekankan soal kemungkinan bias dari jawaban responden yang cukup tinggi; bisa jadi persentase jawaban mereka yang menyatakan “menerima” lebih tinggi dari angka survei di atas.

Terkait pertanyaan apakah akan memilih calon yang memberi uang atau barang, mayoritas warga mengatakan tidak akan memilih calon tersebut (56 persen), dibandingkan mereka yang mengatakan sebaliknya (34 persen). Ini menandakan efektivitas politik uang yang cukup rendah mengingat pemilih memiliki keleluasaan membelot dari komitmen memilih calon yang menawarkan uang atau barang. Tetapi lagi-lagi ini juga harus mempertimbangkan faktor *socially-desirable answer* yang bisa saja dilakukan responden mengingat isi pertanyaan yang cukup sensitif.

Tabel 2:
Menerima uang/barang dari calon tertentu?

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Menerima	1,109	45.73
Menolak	1,263	52.08
Tidak tahu	53	2.19
Total	2,425	100

Tabel 3:
Memilih calon yang memberi uang/barang?

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memilih	820	33.81
Tidak memilih	1,345	55.55
Tidak tahun	258	10.64
Total	2,425	100

Hal yang lebih informatif kita dapatkan terkait program-program redistributif menjelang Pemilu. Mayoritas responden, 70 persen, mengatakan bahwa pembangunan seperti jalan, jembatan, dan pasar adalah wajar, bahkan jika pembangunan dilaksanakan menjelang hari pemilihan. Kami juga melihat korelasi tinggi antara mereka yang mengatakan “wajar” dengan dukungan terhadap petahana di mana tingkat dukungan terhadap calon petahana nyaris dua kali lipat dibandingkan non-petahana. Sejalan dengan studi-studi yang menyatakan ada hubungan erat antara program dan bantuan sosial dengan tingkat dukungan partai penguasa atau calon petahana,² temuan ini merupakan insentif bagi petahana untuk menjalankan program pembangunan yang bersifat adhoc mengingat pemilih di Jawa tampaknya agak sulit membedakan pembangunan yang bersifat politis dan non-politis.³ Pemilih terkesan tidak terlalu peduli jika pembangunan ini dilakukan untuk

Socially-desirable response and acquiescence in a cross-cultural survey of mental health. *Journal of Health and Social Behavior*, 189-197.

² Misalnya pengaruh program Bolsa Familia terhadap suara partai penguasa di tiga Pemilu di Brazil, lihat Zucco Jr, C. (2013). When payouts pay off: Conditional cash transfers and voting behavior in Brazil 2002–10. *American journal of political science*, 57(4), 810-822.

³ Myopic voters dalam kaitannya dengan bencana alam, dimana daerah terdampak bencana yang mendapatkan bantuan disaster relief cenderung mendukung partai pemerintah. Ini mengakibatkan

kepentingan kampanye, sejauh program pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang bersifat sporadis dan non-programatis seperti ini bisa menjadi alternatif bagi petahana untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Tabel 4:
Membangun sarana umum menjelang Pemilu?

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Wajar	1,696	69.94
Tidak wajar	652	26.89
Tidak tahu	77	3.18
Total	2,425	100

Terkait dengan sejauh mana politik uang dan patronase berpengaruh terhadap dukungan petahana, studi ini menunjukkan hasil yang *mixed*. Dari tiga variabel, yakni apakah responden menerima uang atau barang; apakah akan memilih calon yang memberi uang atau barang; dan respons atas pembangunan sarana umum yang dilakukan menjelang pemilu, hanya prediktor “memilih calon yang memberi uang atau barang” yang menunjukkan hubungan signifikan terhadap dukungan calon petahana (tabel 5). Sementara kami tidak menemukan hubungan signifikan pada variabel “menerima uang atau barang dari calon tertentu”. Bahkan variabel membangun sarana umum menjelang pemilu menunjukkan hasil yang justru akan menurunkan suara petahana. Hasil ini bisa jadi agak membingungkan kalau kita percaya bahwa mereka yang menerima sesuatu dari politisi akan cenderung memilih politisi tersebut. Tetapi ternyata kedua variabel menunjukkan hasil yang berbeda (setidaknya dari nilai standar *p-value* yang di bawah 0.1). Ini artinya kita bisa mengatakan (a) menerima uang atau barang dan (b) memilih calon yang memberikan uang atau barang adalah dua hal yang berbeda; orang bisa saja menerima suatu pemberian dari politisi, tetapi pemberian itu tidak membuatnya terikat dengan kewajiban memilih politisi tersebut. Yang justru agak sulit adalah memberi penjelasan soal mengapa variabel “membangun sarana umum menjelang pemilu” justru menurunkan dukungan suara petahana.⁴ Apakah ini berarti masyarakat mampu bersikap kritis dan membedakan pembangunan yang bersifat politis ketika Pemilu menjelang (meskipun mayoritas mereka mengatakan bahwa pembangunan model seperti ini adalah “wajar,” seperti yang bisa dilihat di tabel 4)? Atau apakah ada sumbangsih calon non-petahana yang berhasil meyakinkan masyarakat terkait pembangunan-pembangunan yang sarat kepentingan tersebut? Sayangnya kami tidak bisa berspekulasi terlalu jauh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi setidaknya hasil yang *mixed* dari data internal CSIS ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak konsisten antara politik uang dan patronase terhadap dukungan suara kandidat petahana: Ada kemungkinan petahana mampu mempengaruhi suara pemilih lewat pendekatan-pendekatan tertentu yang didesain untuk mendongkrak suara, tetapi disisi lain ada juga kebijakan-kebijakan yang punya tujuan sama tetapi justru gagal menaikkan elektabilitas calon petahana.

kecenderungan untuk mengabaikan aspek disaster preparedness dalam bencana, lebih detail lihat Healy, A., & Malhotra, N. (2009). Myopic voters and natural disaster policy. *American Political Science Review*, 103(3), 387-406.

⁴ Odds ratio di bawah 1 berarti menunjukkan nilai koefisien yang negatif.

Tabel 5:
Pengaruh klientalisme dan politik uang terhadap dukungan suara petahana
(logistik regresi)

Dukungan terhadap petahana	Model 1		Model 2	
	Odds Ratio	Std. Err	Odds Ratio	Std. Err
Menerima uang/barang dari calon tertentu	1.000397	0.0003292	1.000352	0.000331
Memilih calon yang memberi uang/barang	1.000264*	0.000148	1.000264*	0.000149
Membangun sarana umum menjelang pemilu	0.9995726*	0.0002359	0.9995619*	0.000237
Kepuasan terhadap kinerja Pemprov			1.001097*	0.000577
Kondisi ekonomi keluarga			0.9996027	0.000475
Kepuasan terhadap kinerja Jokowi-JK			1.000354	0.000488
Konstanta	1.667504	0.0751231	1.653689	0.075358
Pseudo R2	0.0028		0.0045	
Jumlah observasi	2,425		2,416	

*P<0.1

Selain itu, nilai signifikan yang ditunjukkan variabel “memilih calon yang memberi uang atau barang” memang tidak menunjukkan hubungan kausal antara variabel ini dengan dukungan terhadap calon petahana. Tetapi ia setidaknya menunjukkan kecenderungan politik uang atau pemberian imbalan dalam bentuk barang dan jasa lebih tinggi terjadi pada calon petahana dibandingkan calon non-petahana. Model hubungan ketiga prediktor ini tetap bertahan setelah kita memasukkan variabel lain, yakni kepuasan terhadap kinerja Pemprov, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - JK, dan kondisi ekonomi keluarga setahun terakhir. Responden yang mengatakan bahwa mereka akan memilih calon yang memberi uang atau barang akan cenderung mendukung petahana, sementara variabel membangun sarana umum menjelang pemilu kembali menunjukkan hasil yang akan menurunkan suara petahana. Variabel kepuasan terhadap kinerja Pemprov juga menunjukkan hubungan signifikan terhadap suara petahana. Ini adalah hasil yang masuk akal karena berarti pemilih mengevaluasi kinerja Pemprov dan memberi *reward* kepada petahana dengan cara memilih mereka kembali dalam Pemilu selanjutnya. Sementara tidak ditemukan bukti bahwa kondisi ekonomi keluarga dan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - JK akan menguntungkan petahana secara elektoral.

Tabel 6:
Hubungan antar variabel

Variabel	Dukungan terhadap petahana	Menerima uang/barang dari calon tertentu	Memilih calon yang memberi uang/barang	Membangun sarana menjelang pemilu	Kepuasan terhadap kinerja Pemprov	Kondisi ekonomi keluarga	Kepuasan terhadap kinerja Jokowi - JK
Dukungan terhadap petahana	1						
Menerima uang/barang dari calon tertentu	0.0325	1					
Memilih calon yang memberi uang/barang	0.0427	0.2869	1				
Membangun sarana umum menjelang pemilu	-0.0319	0.1017	0.067	1			
Kepuasan terhadap kinerja Pemprov	0.0418	0.0138	0.0194	0.029	1		
Kondisi ekonomi keluarga	-0.0113	0.0117	0.0418	0.0728	0.2841	1	
Kepuasan terhadap kinerja Jokowi - JK	0.0107	0.0581	0.0321	0.0628	0.2726	0.38	1

Terakhir, kami menggunakan korelasi antar variabel untuk memperlihatkan kekuatan interaksi antar sesama variabel yang digunakan dalam artikel ini. Hasilnya menunjukkan hubungan yang konsisten dengan tabel regresi sebelumnya. Terlihat bahwa dukungan terhadap petahana memiliki korelasi positif terhadap variabel lain, kecuali variabel membangun sarana umum jelang pemilu dan kondisi ekonomi keluarga, di mana kedua variabel ini menunjukkan angka negatif (meskipun harus diingat bahwa hubungan antar variabel ini terlihat *modest* dengan angka korelasi yang kurang dari 0.1). Dalam tabel 6 juga bisa dilihat bahwa variabel memilih calon yang memberi uang atau barang memiliki hubungan paling kuat terhadap dukungan terhadap petahana. Mereka yang mengatakan menerima uang dari calon tertentu cenderung akan memilih calon yang memberikan imbalan tersebut (korelasi 0.3). Refleksi kondisi ekonomi keluarga yang membaik juga akan mempengaruhi persepsi kinerja Pemprov yang bersangkutan dan pada akhirnya juga mempengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi - JK.

Penutup

Istilah “politik uang” dan “patronase” yang digunakan dalam artikel ini bukannya tanpa risiko. Penyematan kedua konsep yang mengacu pada tiga pertanyaan di survei bisa dianggap sebuah simplifikasi yang terlampau jauh jika tidak dibarengi dengan data-data lain yang lebih mendetail yang bisa menjelaskan secara rinci mekanisme operasional bagaimana politik uang dan patronase bekerja di lapangan. Untuk itu penelitian kualitatif dengan tema seperti ini menjadi penting dilakukan, terutama di masa-masa puncak kampanye Pilkada, di mana setiap kandidat akan lebih banyak berkunjung ke kantong-kantong masyarakat. Di sanalah model-model interaksi dan strategi menggaet suara di tingkat akar rumput antara pemilih dan kandidat dapat diurai secara lebih konkret.

Tentang Penulis

Noory Okthariza adalah peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS. Ia bergabung dengan CSIS pada tahun 2017. Minat penelitiannya adalah pada isu-isu demokratisasi, pemilu, dan pembangunan politik. Ia mendapat gelar MA di jurusan Ilmu Politik, Ohio University, Amerika Serikat.